

ASOSIASI KINERJA KEUANGAN, KEBERPIHAKAN ANGGOTA DEWAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Herkulanus Bambang Suprasto¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRACT

This research examines the influence of financial performance (self-sufficiency ratio, the ratio of effectiveness, efficiency ratio), partialities of the legislature to the public on economic growth with public participation and transparency of public policy as moderating variable. This research was conducted at the local government/city of East Java and Bali. Hypothesis testing is done by multiple regression analysis. The data used in this analysis is a data pool time-series cross-sectional.

This findings study's indicate financial performance and the partialities of legislative members are able to explain regional economic growth. Community participation as a moderation variable able to confirm model in explaining economic growth. However, public participation is not the main drivers of economic growth. Test results showed local governments are major actors in promoting economic growth and financial independence is the main drivers of regional economic growth.

Keywords: financial performance, parliamentary legislature to public, community participation & transparency of public policy and economic growth.

ABSTRAK

Penelitian menguji pengaruh kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi), keberpihakan dewan perwakilan rakyat pada publik terhadap pertumbuhan ekonomi dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di pemerintahan daerah/kota Jawa Timur dan Bali. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisa regresi berganda. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data *pool time-series cross-sectional*.

Temuan penelitian ini mengindikasikan kinerja keuangan dan keberpihakan anggota legislatif mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah. Partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi mampu mempertegas kemampuan model dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian partisipasi masyarakat bukan pemicu utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan diluar penerimaan pajak pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci: kinerja keuangan keberpihakan dewan perwakilan rakyat pada publik, partisipasi masyarakat&transparansi kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kebijaksanaan desentralisasi tersebut merupakan artikulasi penting dalam perubahan manajemen birokrasi yang sedang mengalami proses transformasi. Transformasi tersebut dikenal “*Good Government Governance*“. Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas merupakan tuntutan yang harus dipenuhi Pemda. Perubahan paradigma tersebut mendorong berkembangnya akuntansi sebagai ilmu atau praktik untuk mengisi kebutuhan manusia dalam menentukan solusi dan alternatif guna meningkatkan kualitas hidup umat manusia.

Akuntansi berperan untuk menyajikan kinerja instansi pemerintah secara umum dan pemda secara khusus. Akuntansi sendiri sebenarnya merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk menampilkan kinerja suatu entitas kepada pihak yang

berkepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan alokasi sumber daya secara efektif. Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama pengukuran kinerja instansi adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal serta alokasi sumber daya dalam pengelolaan keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat di daerah tersebut. Pengelolaan daerah yang dilakukan dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan pada daerah tersebut dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi), keberpihakan dewan perwakilan rakyat pada publik terhadap pertumbuhan ekonomi dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan literature akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi sektor pemerintahan daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada manajemen keuangan

daerah terutama dalam pengembangan atau pengadopsian ukuran kinerja pemerintahan daerah.

Rasio Keuangan

Angka-angka yang dilaporkan pada laporan keuangan adalah fungsi dari metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Angka-angka yang dikemukakan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor orientasi perusahaan (*firm-oriented*), industri, dan ekonomi. Empat faktor *firm-oriented* (Foster: 1986, P.133) tersebut adalah:

1. gabungan usaha. Misalnya, perusahaan bekerja pada jalur bisnis tunggal (LOB), bisnis-bisnis yang dipadukan secara vertikal, bisnis-bisnis yang dipadukan secara horizontal, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teknologi, atau bisnis-bisnis lainnya.
2. keputusan Keuangan. Misalnya, keuangan akan ditingkatkan dengan modal sendiri, pinjaman bank, hutang umum, *lease*, atau kemitraan Riset dan Pengembangan. Dan apakah pinjaman bank pada suku bunga berubah atau tetap?
3. keputusan Usaha. Misalnya, gabungan produk apa yang akan dibuat, tingkat gaji apa yang akan dibayar, tingkat inventaris apa yang akan diadakan dan seberapa banyak yang akan dibahas pada hal-hal yang bersifat pilihan seperti riset dan pengembangan serta penyelidikan?

4. keputusan metode akuntansi dan pelaporan keuangan lain. Misalnya, aturan aset dan kewajiban apa yang akan diambil dari pilihan-pilihan yang ada, aturan apa yang akan digunakan kredit pendapatan dan biaya dan hal-hal apa yang akan dikelompokkan sebagai luar biasa?

Pemilihan metode akuntansi (dan keputusan pelaporan keuangan lain) mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor orientasi organisasi dan oleh faktor-faktor industri dan ekonomi. Cara yang paling lazim yang digunakan untuk merangkum laporan keuangan adalah bentuk rasio. Motivasi untuk mengkaji data dalam bentuk rasio (Foster: 1986 P.96) adalah:

1. untuk mengendalikan efek perbedaan besar (*size differences*) di antara perusahaan atau di sepanjang waktu.
2. untuk membuat data lebih dapat memenuhi asumsi dasar bagi perangkat statistik (*statistical tools*), seperti analisis regresi (misalnya, *homoscedastic disturbances*).
3. membuktikan teori dimana sebuah rasio menjadi variabel penting (*variabel of interest*).
4. Menggunakan regularitas empiris yang diamati antara rasio finansial dengan prediksi variabel kepentingan (misalnya, resiko sebuah sekuritas atau kemungkinan dari sebuah perusahaan yang menyatakan diri bangkrut).

Pengendalian atas efek perbedaan besar (*size differences*) merupakan motivasi yang paling sering disebut untuk menganalisis data dalam bentuk rasio. Asumsi dasar

yang penting bagi pemakaian rasio-rasio sebagai kontrol atas perbedaan besar (*size differences*) yakni proporsionalitas yang ketat (*strict proportionality*) antara *numerator* dengan *denominator*. Proporsionalitas yang ketat ini diasumsikan dalam perbandingan rasio di antara perusahaan-perusahaan pada suatu saat tertentu dan dalam perbandingan rasio-rasio dari perusahaan sepanjang waktu. Rasio-rasio keuangan yang paling sering dianjurkan digunakan dalam analisis dalam literatur meliputi tujuh kategori yaitu (1) posisi kas, (2) likuiditas, (3) modal kerja/*cash flow*, (4) struktur modal, (5) *debt service coverage*, (6) profitabilitas, dan (7) *turnover* (Foster: 1986 P.60).

Kinerja Keuangan Institusi Pemerintah

Kinerja merupakan capaian atas apa yang direncanakan, baik oleh unit organisasi maupun organisasi secara keseluruhan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan perbandingan antara angka – angka yang disajikan dalam laporan keuangan baik berupa neraca, laporan realisasi anggaran maupun laporan aliran kas.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan

berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim, 2001). Pengukuran kinerja keuangan dalam organisasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain; rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sumber dana dari pendapatan daerah atau sumber dana internal daerah. Rasio disisi lain juga dapat menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini menggambarkan semakin mandirinya pemerintah dalam membiayai aktivitas pemerintah daerah.

Makna efektifitas adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu aktivitas progam yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Suatu kegiatan pelaksanaan progam dikatakan efektif jika kegiatan tersebut menggambarkan kemampuan atau meningkatkan kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat atau sasaran lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas dapat digambarkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.

Rasio efisiensi digambarkan dengan perbandingan antara input dengan output, dalam organisasi pemerintah makna efisiensi dapat digambarkan dengan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Faktor penentu efisiensi dan efektifitas sebagai berikut (Budiarto, 2007):

- a) faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan; faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional;
- b) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan;
- c) faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat;
- d) faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien dan sebaliknya, dengan asumsi bahwa semua pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peruntukannya dan apa yang telah direncanakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal dan diperolehnya hasil yang diharapkan.

Anggaran Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Sebagai Wujud Keberpihakan Legislatif pada Publik

Aspek penting lain dari administrasi pembangunan adalah pembiayaan dari usaha pembangunan secara berencana. Administrasi pembangunan dapat dilihat dari kemampuan merumuskan kebijakan dan realisasi pelaksanaannya dalam rangka mobilisasi dana serta penggunaannya secara efektif, sehingga menimbulkan proses pembangunan. Pembiayaan pembangunan, penggalan sumber, arah dan cara penggunaannya sangat mempengaruhi perkembangan politik, social dan ekonomi suatu masyarakat (Tjokroamidjojo, 1985).

Teori agensi menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumberdaya dalam anggaran yang ditetapkan (Magner & Johnson, 1995). Eksekutif sebagai agen sebagai pengusul anggaran dan juga pelaksana atau pengguna anggaran berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran (Smith & Bertozzi, 1998). Di sisi lain, publik sebagai prinsipel memilih politisi untuk membuat keputusan tentang penggunaan sumberdaya bagi kepentingan mereka.

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor pelayanan publik paling penting dipenuhi oleh pemerintah (Ablo & Reinikka, 1998) sehingga alokasi anggaran untuk kedua sektor ini relatif besar dibanding sektor lain. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk pelayanan

publik yang paling mendasar dan karenanya menjadi fokus utama pembelaan legislatif di pemerintahan. Namun, belanja untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah *area* yang dapat memberikan peluang untuk korupsi sehingga anggaran pendidikan, kesehatan, dan sosial akan diperkecil (Gupta et al., 2002; Mauro, 1998a; Schiavo-Campo, 1999).

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang semestinya diberikan oleh pemerintah dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Davoodi et al., 2003; Gupta et al., 2002), sehingga keberpihakan legislatif kepada sektor ini merupakan suatu keharusan. Penjelasan teoretis atas ketidakberpihakan legislatif pada sektor-sektor tersebut dapat dilihat dari konsep hubungan keagenan karena anggota parlemen memiliki kecenderungan menciptakan rente (*rent creation*). Mauro (1998a, 1998b) dan Tanzi & Davoodi (2002) menemukan bahwa anggaran untuk investasi publik lebih disukai karena dapat memberikan komisi lebih besar daripada belanja untuk pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Preferensi legislatif mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan rente lebih besar. Artinya, kecenderungan legislatif untuk lebih suka pada alokasi belanja modal merupakan realisasi dari kepentingan mereka.

Partisipasi Masyarakat Dan Tansparansi Kebijakan Publik

Selain akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. transparansi

(*transparency*), yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (OECD: 1999). Dengan demikian, transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Dengan demikian semakin transparan kebijakan publik (APBD) maka pengawasan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat terlibat dalam pengawasan kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dapat diproksikan dengan jumlah pembayaran pajak oleh masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menggambarkan pertambahan produksi barang dan jasa dalam masyarakat dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Definisi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara atau daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga adanya peningkatan standar hidup. Tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1997).

Hipotesis

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya misi pemerintah daerah. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi

berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat ditunjukkan dengan kemandirian keuangan daerah, efektif, dan efisiensi serta pengelolaan secara ekonomis suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang semestinya diberikan oleh pemerintah dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Davoodi et al., 2003; Gupta et al., 2002), sehingga keberpihakan legislatif kepada sektor ini merupakan keharusan. Penjelasan teoretis atas ketidakberpihakan legislatif pada sektor-sektor tersebut dapat dilihat dari konsep hubungan keagenan karena anggota parlemen memiliki kecenderungan menciptakan rente (*rent creation*). Mauro (1998a, 1998b) dan Tanzi & Davoodi (2002) menemukan bahwa anggaran untuk investasi publik lebih disukai karena dapat memberikan komisi lebih besar daripada belanja untuk pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Preferensi legislatif mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan rente lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut dan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1}: Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, , rasio efektifitas, rasio efisiensi dan keberpihakan legislatif pada publik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_{A2}: Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio

efektifitas, rasio efisiensi dan keberpihakan legislatif pada publik dengan pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian

Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian ini meliputi variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *pertumbuhan ekonomi* yang dinotasikan dengan Y. Variabel bebas penelitian ini meliputi kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dan keberpihakan legislatif pada publik yang dinotasikan dengan X1, X2, X3, X4 dan X5.

Definisi Operasional Dan Pengukurannya

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel rasio kemandirian, , rasio efektifitas, rasio efisiensi dan keberpihakan legislatif pada publik sebagai variabel bebas dan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Guna menyeragamkan persepsi atas proksi variabel tersebut, disini perlu disampaikan definisi operasional berikut.

Pertumbuhan ekonomi (PE) sebagai sebagai variabel terikat (Y) adalah variabel yang menggambarkan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat secara agregat sehingga

memungkinkan untuk meningkatkan standar hidup, dengan demikian variabel ini dapat diukur dengan rumus berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_t}$$

Keterangan:

$PDRB_t$ = Pendapatan domestik regional bruto periode t

$PDRB_{t-1}$ = Pendapatan domestik regional bruto periode t-1

Rasio kemandirian adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sumber dana dari pendapatan daerah atau sumber dana internal daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio efektifitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah.

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}}$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan output dan atau mewujudkan outcome dengan input yang dimiliki atau yang dikeluarkan. Rasio ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Keberpihakan anggota legislatif (anggota dewan) merupakan gambaran usaha anggota dewan dalam memperjuangkan kebutuhan mendasar masyarakat yaitu

kesehatan dan pendidikan. Keberpihakan anggota dewan pada publik (KDPP) diukur dengan rumus berikut:

$$\text{KDPP} = \frac{\text{Jumlah anggaran bidang kesehatan} + \text{Jumlah Anggaran Pendidikan}}{\text{Total Anggaran}}$$

Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai anggaran sehingga menimbulkan kerelaan masyarakat dalam ikut serta membiayai penyelenggaraan Negara yang diwujudkan dengan pembayaran pajak. Variabel ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{PMTKP} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pjk Thn t} - \text{Jumlah Penerimaan Pjk Tahun t-1}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Tahun t-1}}$$

Keterangan:

PMTKP = partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat kuantitatif. Data yang dimaksud adalah laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah/Kota di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Teknik Pengumpulan Data

Data digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi non perilaku. Data yang dimaksud adalah laporan keuangan kabupaten/kota dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

laporan keuangan daerah kabupaten/kota berupa *hard copy* yang terdiri dari Neraca, laporan laba-rugi, dan laporan arus kas dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan data penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, sumber data tersebut sebagai berikut:

- Situs-situs Pemerintah kabupaten/Kota dan Provinsi berupa Laporan Publikasi dari hasil pemeriksaan BPK.
- Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dari daerah kabupaten/kota setempat.
- Serta sumber lainnya.

Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Data yang digunakan berupa data panel (*pool time-series cross-sectiona*).

Teknik Analisa Data

Dalam analisa data guna menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode statistik dengan menggunakan bantuan fasilitas SPSS.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut:

- Menghitung statistik deskriptif kelima variabel (variabel terikat dan variabel bebas) yakni Mean dan Standar Deviasi.
- Menguji hipotesis dengan metode Regresi. Model tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \alpha_5 X_5 + \epsilon_i \quad (1)$$

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \alpha_5 X_5 + \alpha_6 X_1 X_5 + \alpha_7 X_2 X_5 + \alpha_8 X_3 X_5 + \alpha_9 X_4 X_5 + \epsilon_i \quad (2)$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan ekonomi (PE)
- X₁ = rasio kemandirian
- X₂ = rasio efektifitas
- X₃ = rasio efisiensi
- X₄ = keberpihakan legislative pada publik
- X₅ = partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public
- X₁X₅ = interaksi variable X₁ dan X₅
- X₂X₅ = interaksi variable X₂ dan X₅
- X₃X₅ = interaksi variable X₃ dan X₅
- X₄X₅ = interaksi variable X₄ dan X₅
- α₀ = konstanta
- α_{1,2,3,4} = koefisien regresi masing-masing variabel
- ε_i = error

Pengujian model fit (kelayakan model) dilakukan dengan uji F. Uji ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan PE. dengan hipotesis statistikal berikut (dinyatakan dalam format alternatif):

$$H_a: P_{\text{value}} < 0,05$$

Pengujian hubungan masing-masing variabel secara individual (parsial), digunakan uji t dengan hipotesis statistikal berikut (dinyatakan dalam format alternatif):

$$H_a: P_{\text{value}} X_i < 0,05, i = 1,2,3,4, 5,$$

Hasil dan Pembahasan

Peneliti sebelum melakukan analisis regresi telah melakukan analisis pelanggaran uji asumsi untuk terpenuhinya syarat pengujian model analisis regresi

meliputi uji normalitas, *Multicollinearity*, *Heteroskedastisitas* dan uji Autokorelasi. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan data tidak ada masalah dengan normalitas, *Multicollinearity*, *Heteroskedastisitas* dan uji Autokorelasi.

Deskriptif Variabel Penelitian

Sampel dalam penelitian diambil dari populasi Pemda Bali dan Jawa Timur. Berdasarkan wilayah geografis terdiri dari 10 Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk Bali dan 39 Pemprov/Pemkab/Pemkot Jawa Timur. Data yang diperoleh sebanyak 49 laporan keuangan dengan periode pengamatan 5 tahun sehingga diperoleh 245 sampel pengamatan. Dari 245 sampel pengamatan tersebut ada data yang tidak lengkap dan beberapa data merupakan data *oulier* sehingga dikeluarkan dari analisis. Berdasarkan hasil kumpulasi data yang mempunyai nilai Z-score lebih dari $\pm 2,96$ dikeluarkan sehingga diperoleh data yang layak dianalisis sebanyak 198.

Deskriptif statistik data disajikan dalam Tabel 4.3. Variabel meliputi variabel terikat (variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain) penelitian ini adalah *pertumbuhan ekonomi* yang dinotasikan sebagai Y. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dinotasikan dengan Xi. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi; rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, keberpihakan Dewan pada publik dan variable partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Tabel 4.3 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	198	,0043	,1068	,055858	,0099848
RK	198	,029264997587	,751543327120	,130462376005	,15668800442901
EFEK	198	,066387392145	5,43231371664	1,13359900940	,35443327655946
EFIS	198	,013674072315	7,61486523530	,982898405616	,50240215447243
KDPP	198	,000063118600	21,5361546194	,266951079500	1,5240374566425
PMTKP	198	,004502552796	,670100399111	,070678655206	,14567697751447
Valid N (listwise)	198				

Sumber: lampiran 1

Tabel 4.3 menunjukkan mean dari pertumbuhan ekonomi (PE) bernilai positif dengan nilai mean sebesar 5,59% dengan standar deviasi sebesar 0,990%. Itu berarti perekonomian Jawa Timur dan Bali secara keseluruhan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi ini juga selaras dengan rasio kemandirian daerah cukup baik.

Pertumbuhan ekonomi ini nampaknya memungkinkan untuk terus ditingkatkan dengan meningkatkan keberpihakan anggota dewan sebagaimana dihipotesiskan sebelumnya. Keberpihakan anggota dewan pada masyarakat dan partisipasi masyarakat dan transparansi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberpihakan anggota dewan yang diproksikan dengan jumlah anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan mempunyai mean sebesar 26,70%. Sementara partisipasi masyarakat dan transparansi yang diproksikan dengan jumlah pembayaran pajak. Partisipasi masyarakat Jatim dan Bali mempunyai rata-rata sebesar 7,07%

dengan standar deviasi sebesar $\pm 14,57\%$. Partisipasi masyarakat ini diharapkan memoderasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil Uji Statistik

Pengujian hipotesis 1 (satu) dilakukan berdasarkan pengujian model *fit* (kelayakan model) dilakukan dengan uji F berdasarkan rumus 1 dan hipotesis statistik $H_a: P_{\text{value}} < 0,05$. Hasil uji hipotesis 1 (satu) pada Tabel 4.4. Dalam hal ini juga melihat kemampuan model untuk menjelaskan Pertumbuhan ekonomi dengan melihat nilai *Adjusted R Square*. Hasil uji tersebut menunjukkan variabel KR, Efek, Efis, KDPP dan PMTKP mampu menjelaskan PE.

Hasil uji statistik pada Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji model dengan nilai *F Change* sebesar 5,095 dan signifikansi 0.000 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 9,40%, ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan atau mempunyai daya prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 9,40% dan sebesar 90.60% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukan dalam model ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa masih ada variabel lain yang diperlukan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.4 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change

1	,342(a)	,117	,094	,0095031	,117	5,095	5	192	,000
---	---------	------	------	----------	------	-------	---	-----	------

a Predictors: (Constant), PMTKP, EFEK, EFIS, KDPP, RK

b Dependent Variable: PE

Tabel 4.5 menyajikan hasil regresi dari KR, Efek, Efis, KDPP dan PMTKP terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian secara individual menunjukkan konsisten dengan hipotesis dimana KR, EFIS dan PMTKP **signifikan** terhadap PE.

Tabel 4.5 Hasil Regresi PE atas KR, Efek, Efis, KDPP dan PMTKP

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,053	,003		19,887	,000
	RK	,128	,027	2,014	4,708	,000
	EFEK	,001	,002	,026	,379	,705
	EFIS	-,006	,002	-,286	-3,196	,002
	KDPP	,000	,000	-,037	-,540	,590
	PMTKP	-,129	,029	-1,883	-4,425	,000

a Dependent Variable: PE

Hasil regresi Tabel 4.5 tersebut menunjukkan hasil uji t (pengujian variabel secara parsial), di mana hasilnya menunjukkan bahwa variabel KR, Efis, dan PMTKP **signifikan** terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel KR mempunyai koefisien *positif* terhadap PE dan EFIS dan PMTKP mempunyai koefisien *negatif* terhadap PE. Hasil regresi tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan variabel tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi (PE).

Tabel 4.6 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin - Watson
						F Change	df1	df2		

					e					
1	,444(a)	,197	,159	,0091563	,197	5,140	9	188	,000	1,351

a Predictors: (Constant), Interaksi, EFEK, EFIS, KDPP, Interaksi, RK, Interaksi, Interaksi, PMTKP

b Dependent Variable: PE

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji model fit dengan memasukan variable partisipasi masyarakat sebagai variable moderating. Berdasarkan uji statistik dalam Table 4.6 menunjukkan model interaksi mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,90%. Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menggunakan rumus 2. Hasil pengujian hipotesis 2 disajikan dalam Table 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,042	,005		8,772	,000
	RK	,097	,028	1,527	3,420	,001
	EFEK	,002	,002	,067	,891	,374
	EFIS	,004	,004	,198	,966	,335
	KDPP	,001	,001	,140	1,253	,212
	PMTKP	,141	,098	2,057	1,439	,152
	Interaksi	-,159	,043	-1,569	-3,677	,000
	Interaksi	-,028	,058	-,491	-,484	,629
	Interaksi	-,094	,043	-1,283	-2,188	,030
	Interaksi	-,111	,058	-,310	-1,929	,055

a Dependent Variable: PE

Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 2. Hasil uji tersebut menunjukkan interaksi RK dan PMTKP signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, demikian juga interaksi antara EFIS dan PMTKP signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Interaksi 1 adalah interaksi antara rasio kemandirian dengan partisipasi masyarakat dengan nilai t-tes sebesar -3,677 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan

interaksi 3 adalah interaksi antara efisiensi dengan partisipasi masyarakat dengan nilai t-tes sebesar -2,188 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,03. Sementara interaksi antara keberpihakan anggota dewan dan partisipasi masyarakat signifikan pada tingkat keyakinan 90% dengan nilai t-tes sebesar -1,929 dengan tingkat signifikansi 0,055.

Pembahasan Hasil Pengujian

Hasil uji statistik pada Table 4.4 mendukung hipotesis 1 (H1a). Tabel 4.4 menunjukkan rasio kemandirian mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, secara teoritis semakin mandiri pemerintah daerah akan semakin leluasa dalam mendanai aktivitas – aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang ada. Sementara rasio efisiensi dan partisipasi masyarakat mempunyai koefisien regresi negatif yang berarti rasio efisiensi dan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini walaupun secara statistik signifikan tetapi tidak sesuai dengan harapan. Hasil uji ini menunjukkan pemerintah masih menjadi aktor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji tersebut menunjukkan semakin kecil efisiensi pemerintah daerah akan mendorong naik pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari rumus pengukuran variabel efisiensi itu sendiri. Dimana efisiensi diukur dengan

membandingkan jumlah pengeluaran dengan penerimaan. Dengan demikian semakin besar belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian terhadap hipotesis 2. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara rasio keuangan dan keberpihakan anggota dewan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memasukan variabel partisipasi masyarakat ke dalam model, meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Interaksi antara rasio kemandirian dengan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti menurunnya interaksi antara rasio kemandirian dan partisipasi masyarakat akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain secara individual rasio kemandirian mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tergantung dari kemampuan daerah dalam menggali sumber dana diluar partisipasi masyarakat (penerimaan pajak).

Hasil Pengujian menunjukkan interaksi antara rasio keuangan dan keberpihakan anggota dewan dan partisipasi masyarakat yang diproksikan dengan pembayaran pajak mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pembayaran pajak bukanlah pemicu pertumbuhan ekonomi, karena sesungguhnya pembayaran adalah transfer sumberdaya dari masyarakat ke pihak pemerintah. Transfer sumberdaya ini berarti berkurangnya modal kerja dari masyarakat. Hal

menunjukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi peralihan sumberdaya ini seharusnya diperuntukkan untuk membiayai belanja yang produktif, dimana saat ini peruntukan penerimaan pajak lebih banyak digunakan untuk belanja rutin.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Simpulan

Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan berkaitan dengan pengaruh kinerja keuangan dan keberpihakan anggota dewan/legislatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diuraikan dalam Pendahuluan hipotesis penelitian ini adalah kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, , rasio efektifitas, rasio efisiensi dan keberpihakan legislatif pada publik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan keberpihakan legislatif pada publik dengan pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara meregresikan pertumbuhan ekonomi dengan rasio kemandirian, , rasio efektifitas, rasio efisiensi dan keberpihakan legislatif pada publik serta partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berdasarkan data *pool time-series cross-sectional*.

Secara keseluruhan simpulan penelitian ini mengindikasikan kinerja keuangan dan keberpihakan anggota legislatif mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah. Partisipasi masyarakat sebagai variable moderasi mampu mempertegas kemampun model dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian

partisipasi masyarakat bukan pemicu utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian masih menunjukkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan Pemda harus lebih meningkatkan kemandirian keuangan diluar penerimaan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterbatasan Dan Implikasi Penelitian Berikut

Sumber data penelitian ini adalah laporan keuangan daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka). Sesungguhnya laporan keuangan daerah mempunyai rerangka dasar akuntansi yang sama namun informasi yang disajikan seringkali tidak memenuhi prinsip “uniformity” sehingga keterbandingan laporan keuangan suatu daerah dengan daerah lain seringkali kurang tepat.

Kondisi geografis, budaya, potensi dari suatu daerah dengan daerah yang lain sangat variatif sehingga menimbulkan skala prioritas yang berbeda. Akuntansi sebagai system sosial tentunya praktik akuntansi tidak lepas dari lingkungan. Dengan akuntansi mempunyai keterbatasan untuk menangkap informasi atau realitas yang mungkin signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.

Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan keterbatasan bagi peneliti mengungkap fenomena yang ada. Mengingat keterbatasan tersebut penelitian berikut hendaknya mempertimbangkan penggunaan/menambah fenomena/variable lain untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Penambahan sampel juga memungkinkan

dilakukan dalam analisis sehingga hasil penelitian mempunyai *power of test* yang lebih baik.

REFERENSI

- Ablo, Emmanuel & Ritva Reinikka. 1998. Do budget really matter? Evidence from public spending on education and health care in Uganda. World Bank, *Policy Research Paper 1926*.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. Corruption: A review of contemporary research. *Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7*. Web: <http://www.cmi.no>.
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Ball, R. and P. Brown. 1968. "An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers". *Journal of Accounting Research* 6 (Autumn): 159-178.
- Ball, R., Kothari, S.P., Watts, Ross L., 1992. "Economic Determinants of the Relation
- Bambang Suprasto. 2005. "Asosiasi Antara Ukuran Performa Akuntansi dan Return Saham". Buletin Studi Ekonomi Vol. 10 No.1: 78-96
- Barnes, Paul. 1987. "The Analysis And Use of Financial Ratios: A Review Article", *Journal of Business Financial & Accounting*, Winter 14 (4): 449-459.
- Between Earnings Changes and Stock Returns ", *The Accounting Review* Vol.68 No.3. pp 822-838.
- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Cokroamidjojo, Bintoro, 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES
- Davoodi, Hamid R., Erwin R. Tiongson, & Sawitree S. Asawanuchit. 2003. How useful are benefit incidence analyses of public education and health spending? *IMF Working Paper* WP/03/227.
- Financial Accounting Standards Board (1978). "Objectives of Financial Reporting By Business Enterprises", *Statement of Financial Accounting Concepts No.1*, FASB.
- Foster, George. 1986. *Financial Statement Analysis*. Prentice – Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting.

- Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper 147*.
- Groehendijk, Nico. 1997. A principal-agent model of corruption. *Crime, Law & Social Change* 27: 207-229.
- Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi, & Erwin R. Tiongson. 2002. Corruption and the provision of health care and education services, dalam Abed, George T. & Sanjeev Gupta (eds.). 2002. *Governance, Corruption, & Economic Performance*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Magner, Nace & Gary G. Johnson. 1995. Municipal officials' reactions to justice in budgetary resource allocation. *Public Administration Quarterly* (Winter): 439-456.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mauro, Paolo. 1998a. Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics* 69: 263-279.
- Mauro, Paolo. 1998b. Corruption: Causes, consequences, and agenda for further research. *Finance & Development* (March): 11-14.
- Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- OECD. 1999. *The OECD principles of Corporate Governance*. <http://www/oecd.org/daf/governance/principles.htm>.
- Ou, Jane A. & Penman, Stephen H. 1989. "Financial Statement Analysis and The Prediction of Stock Return", *Journal of Accounting and Economics*, North-Holland: 295-329.
- Schiavo-Campo, Salvatore (Editor). 1999. *Governance, Corruption, and Public Management*. Manila: Asian Development Bank.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.
- Tanzi, Vito & Hamid Davoodi. 2002. Corruption, public investment, and growth, dalam Abed, George T. & Sanjeev Gupta (eds.). 2002. *Governance, Corruption, & Economic Performance*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Todaro, MP. 1997. *Economic Development*. Sixth Edition. Published by New York University.
- Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.

Wasserman, William; Neter, John; dan Whitmore, G. A, 1993. "Applied Statistics",
Fourth Edition, A Division of Simon & Schuster, inc.